



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN
2020**

**BAGIAN
ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
SETDA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk meningkatkan kinerjanya demi menunjang visi dan misi Bupati Malang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021.

Dalam Laporan Kinerja ini disajikan gambaran secara obyektif atas informasi penerapan indikator dalam angka sebagai bentuk pencapaian kinerja di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Kebenaran data dan angka diolah menjadi bahan evaluasi yang secara kontinyu dikaji agar diperoleh indikator kinerja yang realistis dan didukung oleh sistem yang memadai. Hal ini sangat diperlukan sebagai kejelasan sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk menjabarkan sesuatu yang akan dicapai saat ini maupun periode yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan dan besar harapan kami adanya masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Januari 2021

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661218 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Berpedoman pada Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, Bagian Administrasi Perekonomian Setda bertanggung jawab atas misi Kabupaten Malang terutama misi ke dua yaitu **"Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi"**. Untuk mencapai visi-misi dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, yaitu **"Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)"**, maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah menyusun rencana dan melaksanakan program utama **Program Administrasi Bidang Perekonomian**.

Indikator Kinerja Utama yaitu persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan, dengan formula jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan dibandingkan jumlah bahan tindak lanjut untuk perumusan kebijakan. Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) kebijakan menunjukkan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun, dan diterapkan dalam formulir Pengukuran Kinerja, pencapaian target IKU dalam sasaran Strategis menunjukkan hasil dalam katagori **"sangat berhasil"** yaitu 100%.

Pencapaian target pada sasaran strategis dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan/pelaporan. Proses perencanaan berperan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan pada proses pelaksanaan kegiatan, adakalanya terbentur dengan kendala-kendala sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai target sasaran strategis. *Database* merupakan kendala utama dalam monitoring, disamping itu pengetahuan dan kapasitas aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyediaan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 ini disusun untuk mendapatkan evaluasi dalam upaya penyempurnaan kinerja guna menyajikan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten Malang.

Malang, 4 Januari 2021
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum	4
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	4
2. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2018	7
D. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Kebijakan dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Capaian Kinerja	16
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202016	
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	17
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra..	17
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi	22
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	27
3.1. Alokasi per Sasaran Pembangunan.....	27
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	27
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
B. Realisasi Anggaran.....	28
C. Prestasi Tahun 2019.....	36
BAB IV PENUTUP	37

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda, sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Administrasi Perekonomian Setda merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penjabaran tugas dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Sebagai satuan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda terus berupaya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai sasaran yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Strategis dibuat untuk lima tahun berjalan dan mengacu pada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah guna meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian tertentu Pemerintah Kabupaten Malang.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
- 3) Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
- 4) Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja ini menguraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Setda, dan untuk mencapai visi dan misi tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk:

MEMBERIKAN INFORMASI CAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENCAPAIAN KINERJA SEBAGAIMANA PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.

1. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda, guna peningkatan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
3. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
5. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat Pemerintah Daerah yang berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur Bagian Administrasi Perekonomian Setda, yaitu dari Bagian Perekonomian sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan

Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Sedangkan Bagian Administrasi Perekonomian merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, dan 12 Bagian yang salah satunya adalah Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Sesuai dengan Peraturan tersebut, susunan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Koperasi dan Usaha Mikro, Kasubag Perindustrian dan Perdagangan dan Kasubag Sarana Perekonomian dan BUMD (Bagan terlampir). Jabaran tugas dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Bagian Administrasi Perekonomian Setda :
 1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda:
 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Pelaksanaan koordinasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gambar 1
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
Kabupaten Malang



Secara organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing sebagai berikut:

a. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro

1. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan

1. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD

1. Menyusun program kerja sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Administrasi Perekonomian Setda sampai dengan akhir tahun 2020 didukung sebanyak 13 orang personil/pegawai dengan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bagian	1 orang	-	1 orang
2.	Sub Bag Koperasi dan Usaha Mikro	2 orang	2 orang	4 orang
3.	Sub Bag Perindustrian dan Perdagangan	3 orang	1 orang	4 orang
4.	Sub Bag Sarana Perekonomian dan BUMD	1 orang	3 orang	4 orang
JUMLAH		7 orang	6 orang	13 orang

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan

No.	Eselon	GOL / RUANG					STRATA PENDIDIKAN							
		IV	III	II	I	Non gol	SD	SLTP	SLTA	DI	D III	S-1	S-2	S-3
1	III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	IV	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
3	STAF	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Honorer	-	-	-	-	7	-	1	3	-	1	1	1	-
Jumlah		1	5	-	-	7	-	1	3	-	1	3	4	1

2. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019

Pada tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang masing-masing dilengkapi dengan target yang dapat diukur secara kuantitatif. Berdasarkan tabel 1.3, pelaksanaan kinerja tahun 2019 pada masing-masing indikator **tercapai 100%**, sehingga termasuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			
		Sub Bagian	Target Kinerja	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2019 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaporan tersebut disajikan pada kurun waktu Semester I dan Semester II guna bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi bidang Administrasi Perekonomian di Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada Tahun 2019, Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, serta Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, dengan target kinerja masing-masing yaitu **2 laporan** dan seluruhnya telah terealisasi **100%**.

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tiap titik yang telah ditentukan dalam kerangka acuan kerja pada setiap sasaran strategis, kemudian dikompilasi dalam pelaporan (evaluasi) yang disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakan di bidang perekonomian.

D. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2019

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Matriks Renstra 2016-2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang digunakan untuk membantu suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik, mengoptimalkan sumber daya, serta menjamin suatu organisasi bekerja menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dalam suatu perencanaan strategis terdapat penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu menengah 1 hingga 5 tahun. Sebagai pihak pendukung dalam tercapainya visi-misi Kabupaten Malang, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

"Meningkatkan Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel"

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, yang merupakan bagian integral dalam proses pencapaian kinerja yang diinginkan. Fokus utama sebuah sasaran adalah pelaksanaan kegiatan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang mengarah pada hasil yang nyata. Berdasarkan pada pengertian tersebut, Bagian Administrasi Perekonomian menetapkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran:

"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"

2. Kebijakan dan Program

Strategi menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Bagian Administrasi Perekonomian Setda menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

Mendayagunakan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menunjang Penyelenggaraan Dan Dana Yang Cukup Untuk Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Penyajian Bahan Kebijakan Pimpinan Terutama Di Bidang Administrasi Perekonomian

Kebijakan:

Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Di Bidang Perekonomian (Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Serta Sarana Perekonomian Dan BUMD)

Penerapan Strategi yang tepat dapat merumuskan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, dimana program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program Bagian Administrasi Perekonomian Setda, antara lain:

1. Program Administrasi Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Kepentingan masing-masing Sub Bagian;
3. Kondisi lingkungan internal dan eksternal masa lalu, saat ini dan masa mendatang;
4. Skala Prioritas yang mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda diwujudkan melalui Program Prioritas yaitu Program Administrasi Bidang Perekonomian.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati. Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada tahun 2020 pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rincian Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020

No.	Uraian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	i. Penyediaan Makanan dan Minuman
	j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.	Program Administrasi Bidang Perekonomian
	a. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro
	b. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan
	c. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD
6.	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang
	a. Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Pada tingkat OPD disusun dan disepakati juga Perjanjian Kinerja yang dibuat secara berjenjang pada Eselon IV dan unsur staf.

Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (*outcomes*), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	100 %

Penetapan besaran target capaian mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang yaitu pelaporan kebijakan di bidang perekonomian yang menjadi prioritas utama yang dilaporkan pada akhir tahun, dan evaluasi kebijakan di pertengahan tahun / Semester I. Terkait dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda total anggaran Tahun 2020 adalah sebesar **Rp946.148.441** (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Adapun rincian anggaran per program, yaitu:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020

No	Keterangan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 343.766.763
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 15.959.678
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 4.950.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 230.000
5	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Rp 331.242.000
6	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	Rp 250.000.000
	Jumlah	Rp 946.148.441

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

Secara umum Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat administratif, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dengan realisasinya. Evaluasi capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian, dilakukan menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan yang ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Nilai	Kategori
$X > 85$	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Kurang Berhasil

Pengumpulan data kinerja diperoleh menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Karakteristik Indikator Kinerja Utama antara lain: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kinerja organisasi, maka perlunya pengukuran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Berikut ini disajikan realisasi kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 Bagian Administrasi Perekonomian memiliki sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang diwujudkan melalui Indikator Kinerja Utama berupa Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian. Dari target 100%, realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah 100%, artinya seluruh program dan kegiatan yang menjadi indikator terwujudnya sasaran organisasi telah dilaksanakan secara optimal sehingga kinerja organisasi tercapai 100% sesuai target dengan kategori "Sangat Berhasil".

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Untuk mengetahui hasil kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020 mengalami peningkatan atau tidak, maka selain membandingkan dengan target, maka perlu dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, realisasi kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 maupun tahun 2020 mencapai 100% (sesuai target).

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang selama periode Renstra 2016-2020:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2021	Capaian			Capaian Hingga Akhir Periode Renstra 2016-2021
			2018	2019	2020	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100%	100%	100%	100%	80%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Target dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dapat dianalisa sebagai berikut berikut:

- a) Pada Tahun 2020, Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola



pemerintahan yang baik di bidang perekonomian yang diukur melalui indikator Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian. **Target kinerja sebesar 100% dan dapat dicapai sebesar 100%.**

- b) Pencapaian target 100% adalah terpenuhinya bahan perumusan dan evaluasi kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang direkomendasikan, yaitu disampaikannya bahan tindak lanjut untuk bahan perumusan kebijakan yang didapat melalui pemantauan dan evaluasi pada sektor koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, dan sarana perekonomian dan BUMD.
- c) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada setiap titik yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja pada setiap sasaran strategis, kemudian dikompilasi dalam pelaporan (evaluasi) yang disampaikan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang perekonomian.

Penjelasan atas tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 dan 2020, adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenkelatur Program Prioritas Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Pengesahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Nomor: 188.4/112.1/KEP/35.07.021/2017 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, maka target capaian IKU tahun 2019 adalah 100%.
- b) Pada Tahun 2020, sasaran kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda mengakomodir tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sebagai bahan perumusan kebijakan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang koperasi usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, dan sarana perekonomian dan BUMD.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan 2 laporan sebagai target dan telah direalisasikan 100%. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi pada sektor perindustrian dan perdagangan juga telah mencapai 100% dari target berupa 2 laporan, demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan pada sektor Sarana Perekonomian dan BUMD dilakukan koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja BUMD dengan hasil evaluasi sejumlah 2 laporan. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai wujud pelaksanaan kinerja dalam rangka penyampaian rekomendasi kebijakan dapat diselesaikan

sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga realisasi kinerja Bagian Administrasi Perekonomian tahun 2020 telah mencapai kategori **“Sangat Berhasil”**;

- c) Capaian kinerja pada Bagian Administrasi Perekonomian tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, namun pemanfaatan sumber daya anggaran yang efektif dan efisien juga turut menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Pada tahun 2020, capaian kinerja kembali 100% sebagaimana capaian kinerja pada tahun 2019. Capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda cenderung stabil hingga tahun 2020 yaitu 100%, hal ini karena para penanggungjawab program dan kegiatan serta seluruh personel di lingkungan Bagian Administrasi Perekonomian mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan terhadap tabel pencapaian kinerja selama periode Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda, sebagai berikut:

- a) Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016-2021 mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi pada organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap nomenklatur tujuan dan sasaran kinerja yang telah dirumuskan pada Renstra Bagian Administrasi Perekonomian sebelumnya, namun secara substansial tidak mengalami perubahan, sehingga beberapa penyesuaian dilakukan pada indikator kinerja utama, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di Bidang Perekonomian (terdiri dari sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan Sarana Perekonomian dan BUMD) yang disampaikan sebagai bahan tindak lanjut perumusan kebijakan pimpinan
- b) Tabel 3.4 menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut (2018, 2019, 2020) pada periode Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2016-2021, capaian kinerja masing-masing mencapai 100%. Tahun 2020 merupakan tahun keempat periode Renstra, dengan target capaian kinerja pada akhir periode adalah 100%, sehingga dengan realisasi tahun 2020 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian telah memenuhi 80% target hingga akhir periode Renstra.

Rancangan Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai acuan perencanaan dari tahun ke tahun. Dalam proses perencanaan di Tahun 2020 terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan Tahun 2019. Dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53



Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka susunan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda mengalami perubahan beserta tugas dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Setda dalam menentukan kebijakan organisasi pemerintah menggunakan mekanisme yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang, secara khusus dalam perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan sebagai pengampu untuk proses perencanaan, termasuk Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja OPD merupakan hasil proses kajian *bottom up* dengan tetap mengacu kepada Visi Misi yang dijabarkan pada RPJMD. Penyusunan Renstra dan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dilakukan melalui koordinasi dengan organ-organ didalamnya yaitu masing-masing sub bagian (Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, serta Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD), serta unsur staf. Masing-masing sub bagian menyampaikan prioritas kinerja yang direalisasikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran melalui program dan kegiatan. **IKU Tahun 2020 yang disepakati yaitu Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian.** IKU Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2020 disepakati dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dan diikuti dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda dengan Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan serta Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, yang selanjutnya disepakati juga perjanjian kinerja hingga unsur staf. Sebagai upaya mencapai IKU didukung oleh program dan kegiatan dengan penyediaan anggaran yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap unsur kegiatan dalam mencapai IKU yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Usaha Mikro berdasarkan KAK dilakukan pada 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Monitoring kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan dengan prioritas usaha ekonomi kreatif, yaitu untuk mengetahui potensi dan kemampuan usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Malang dalam mendukung strategi utama Kabupaten Malang yaitu untuk memajukan pariwisata. Metode yang digunakan dalam monitoring yaitu *sampling*, hal ini dengan pertimbangan bahwa jumlah sasaran yang besar, yaitu berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 jumlah usaha mikro sebesar 249.261 pelaku usaha, sehingga diperlukan strategi untuk dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan.

Pool data pada usaha ekonomi kreatif dengan sumber data awal dari aparat kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring di lokasi / tempat pelaku usaha untuk menggali informasi melalui wawancara dengan instrumen blanko pendataan. Hasil pendataan pelaku usaha ekonomi kreatif kemudian dilakukan evaluasi terkait keandalan produk dan jasa yang dihasilkan, dalam evaluasi dimaksud



dihasilkan bahwa terdapat struktur pangsa pasar yang dikhususkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Pangsa pasar tersebut dikategorikan untuk pangsa pasar lokal, regional, nasional dan internasional, yang kemudian dapat dilakukan pembinaan untuk mendukung dan memperluas pangsa pasar lebih lanjut. Disamping itu informasi tentang fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), walaupun pengambilan data dilakukan secara *sampling* pada pelaku usaha ekonomi kreatif, namun tetap dapat memberikan gambaran terhadap kondisi pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Tahapan tersebut menghasilkan Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Usaha Mikro yang disampaikan kepada pimpinan (Sekretaris Daerah) dalam 2 (dua) pelaporan (sesuai dengan target dalam IKU), yaitu pelaporan Semester I dan Semester II. Pelaporan Semester I disampaikan pada 28 Juli 2020 melalui **Nota Dinas tanggal 28 Juli 2020 nomor: 518/4897/35.07.021/2020** dengan pokok pelaporan "Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester I Tahun 2020" (**terlampir**), yang menghasilkan kebijakan sebagai berikut:

- a) Perlunya pembinaan pada pelaku usaha mikro antara Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait untuk menjaga kesinambungan pembinaan,

terutama dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro yang diprioritaskan;

- b) Kolaborasi pembinaan antar Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait menjadi prioritas dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha mikro yang dapat dilakukan melalui *community development* berdasarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Malang.

Salah satu upaya untuk tetap menjaga pasar Pelaku Usaha Mikro yaitu dengan memasuki *e-commerce* dan *e-marketing*, dan Pemerintah Kabupaten Malang melalui surat Sekretaris Daerah (*copy* Surat Sekretaris Daerah terlampir) telah melaksanakan pelatihan penggunaan *e-commerce* dan *e-marketing* bagi pelaku Usaha Mikro yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pelaporan Semester II disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 28 Desember 2020 nomor: 518/8462/35.07.021/2020** dengan pokok pelaporan "Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester II Tahun 2020" (**terlampir**), yang menghasilkan kebijakan yaitu:

- a) Melaksanakan pelatihan penggunaan *e-commerce* dan *e-marketing* bagi pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) Melalui TPAKD, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan pembinaan di Desan Kemantren Kecamatan Jabung dengan metode *Community Development*, serta pembinaan terpadu bersama OPD terkait serta Otoritas Jasa Keuangan Malang.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah agar membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2015/35.07.013/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas antara lain dalam hal pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan stok bahan pokok dan barang penting lainnya,



Koordinasi Pembinaan Pembentukan BUMDes Desa Kemantren Kecamatan Jabung



Rapat Koordinasi TPID Menjelang Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021

stabilisasi harga karena terjadinya fluktuasi harga komoditas tertentu, monitoring barang bersubsidi, konsolidasi dan koordinasi bersama stakeholder terkait seperti dalam menghadapi hari – hari besar keagamaan, tahun baru serta kondisi situasional seperti adanya Kenaikan Harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan juga diseminasi kebijakan peningkatan produksi pertanian bahan pangan. Sebagai salah satu bentuk implementasi tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dilaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga barang komoditas strategis dalam hal ini bahan pokok beras dan komoditas startegis tertentu yang berpotensi menyumbang inflasi, yang dilaksanakan selama bulan Januari hingga Desember 2020 terhadap pedagang di pasar kecamatan, dengan memperhatikan harga jual, wilayah penjualan dan ketersediaan stok beras dan komoditas strategis lain secara *sampling* di titik sentra penjualan di Pasar Kabupaten.

Adapun Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tim Pengendalian Daerah (TPID) melalui Nota Dinas Nomor: 500/4838/35.07.021/2020 Tanggal 24 Juni 2020 Perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPID di Kabupaten Malang sampai dengan Semester I Tahun 2020, yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dengan mengacu pada strategi utama pengendalian inflasi daerah dapat mewujudkan tingkat inflasi sesuai inflasi sasaran Tahun 2020 serta menjaga kestabilan harga pangan dan kecukupan ketersediaan pangan untuk masyarakat;
- b) Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19, maka perlu meningkatkan ketrampilan pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan *platform e-commerce* serta digitalisasi UMKM yang didukung oleh sosialisasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang;
- c) sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perkebunan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuat website yang akan dilanjutkan dengan aplikasi untuk pembelian hasil pertanian oleh ASN Kabupaten Malang.

Pelaporan Semester II disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 31 Desember 2020 nomor : 500/8535/35.07.021/2020** dengan pokok pelaporan “Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester II Tahun 2020”, yang menghasilkan kebijakan yaitu:

- a) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dengan mengacu pada strategi utama pengendalian inflasi daerah akan terus menjaga

kestabilan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19;

- b) terus berupaya menjaga komitmen untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan *platform e-commerce* serta digitalisasi UMKM yang didukung oleh sosialisasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, guna mendukung pemulihan ekonomi dampak Covid-19;
- c) Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, maka dilakukan monitoring terhadap perkembangan kelompok tani/gapoktan dalam mengelola hasil produksi dan pemasaran, sebagai dukungan terhadap upaya digitalisasi pemasaran hingga tingkat petani dengan menggunakan *platform e-commerce* atau sarana digital yang lain.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan BUMD berdasarkan KAK dititikberatkan pada pelaksanaan pembinaan 4 BUMD milik Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu Perumda Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, PT. Kigumas dan PT. BPR Artha Kanjuruhan. Adapun bahwa PT. Kigumas berstatus non operasional, sedangkan PT. BPR Artha Kanjuruhan sebagai Perseroan Terbatas, sehingga peran dan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam manajemen perusahaan tidak terlalu signifikan.



Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan (*unaudited*) dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja BUMD terhadap target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. Sedangkan Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2020.

Kegiatan tersebut menghasilkan Pelaporan Evaluasi Keuangan BUMD yang disampaikan kepada pimpinan (Bapak Bupati Malang) dalam 2 (dua) pelaporan (sesuai dengan target dalam IKU), yaitu pelaporan Tahunan (*Unaudited*) dan (*Audited*) tahun berjalan. Pelaporan Tahunan (*Unaudited*) disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 1 April 2020 nomor: 539/2779/35.07.021/2020** perihal Evaluasi Laporan Keuangan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2019 (*Unaudited*), yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Perlu dilakukan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen, yang selanjutnya hasilnya akan dipergunakan dalam penetapan/pengesahan laba bersih tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
- b) Perlu adanya efisiensi atas biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan biaya usaha, sehingga perolehan laba usaha dapat lebih optimal;
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kerja dengan membandingkan target RKAP agar lebih cermat dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan program kerja dan mencapai tujuan perusahaan pada tahun berikutnya.

Pelaporan Keuangan Tahunan (*Audited*) disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 12 Mei 2020 nomor: 539/3490/35.07.021/2020** perihal Telaah atas evaluasi Laporan Keuangan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2019 (*Audited*) sebagaimana terlampir, yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa penetapan penggunaan laba bersih perusahaan tahun 2019 yang salah satunya adalah untuk kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp7.002.223.955,00.



3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Penggunaan anggaran pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah efektif dan efisien mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh anggaran digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama. Dari total anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020, telah terealisasi **96,44%**. Sisa anggaran yang tidak digunakan dikarenakan sebagian besar menyesuaikan dengan kebutuhan (optimalisasi anggaran).

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Capaian Anggaran	
			(Rp)	(%)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	946.148.441	914.827.032	96,44%

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian sasaran yang optimal dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran pada pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah dimanfaatkan dengan efisien. Berikut ini ditampilkan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran dengan dan realisasi anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran
Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100%	100%	100%	946.148.441	914.827.032	96,69%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu tantangan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah, seiring dengan semakin terbukanya informasi dan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah hingga ke Perangkat Daerah terkait. Kondisi tersebut seiring dengan upaya setiap Organisasi Perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun akuntabilitas kinerja dan anggarannya.

Pada tahun 2020, Bagian Administrasi Perekonomian telah melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran hingga 3,31%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100%	96,69%	3,31%

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2020, maka bersama ini kami laporkan dengan hormat realisasi belanja langsung dan tidak langsung pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		Realisasi		Sisa (Rp)
		Sebelum PAK	Setelah PAK	Rp	(%)	
1	Belanja Langsung	1.474.668.800	946.148.441	914.827.032	96,69%	31.321.409
2	Belanja Tidak Langsung	558.559.400	239.382.600	228.519.517	95,46%	10.863.083
Jumlah		2.033.228.200	1.185.531.041	1.143.346.549	96,44%	42.184.492

Jumlah anggaran **Belanja Langsung** Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2020 **sebelum PAK sebesar Rp1.474.668.800,-** (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Pada tahun berjalan, diberlakukan PAK sehingga jumlah anggaran Belanja Langsung Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada tahun 2020 menjadi **Rp946.148.441,-** (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Berkurangnya anggaran Belanja Langsung Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk penanggulangan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Malang. Anggaran belanja langsung yang mampu terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar **Rp914.827.032,-** (Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah) atau **96,69%**, sehingga terdapat **sisa anggaran sebesar Rp31.321.409,-** (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus Sembilan rupiah),.

Sedangkan Anggaran **Belanja Tidak Langsung** Bagian Administrasi Perekonomian **sebelum PAK sebesar Rp558.559.400,-** (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah), dan setelah PAK menjadi Rp239.382.600,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Anggaran belanja tidak langsung tersebut, telah **terrealisasi sebesar Rp228.519.517,-** (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau **95,46%**, sehingga terdapat **sisa anggaran sebesar Rp10.863.083,-** (sepuluh juta

delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah), yang selanjutnya sisa anggaran tersebut dikembalikan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun realisasi anggaran Bagian Administrasi Perekonomian pada tahun anggaran 2020 setelah PAK yang dirinci per Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah **Rp341.997.717** atau **99,49%** dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	42.330	35.300	83,39%	7.030
b.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	215.815.460	215.195.366	99,71%	620.094
c.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.226.000	6.200.800	99,60%	25.200
d.	Penyediaan alat tulis kantor	15.785.000	15.780.500	99,97%	4.500
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.594.208	2.566.000	98,91%	28.208
f.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	966.765	963.700	99,68%	3.065
g.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.925.000	1.900.000	98,70%	25.000
h.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.652.000	3.599.800	98,57%	52.200
i.	Penyediaan makanan dan minuman	2.800.000	2.340.000	83,57%	460.000
j.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25.135.000	24.691.251	98,23%	443.749
k.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	68.825.000	68.725.000	99,85%	100.000
Jumlah		343.766.763	341.997.717	99,49%	1.769.046

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Rp15.517.406 atau 97,23% dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
a.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0
b.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0	0	0	0
c.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12.147.678	11.758.406	96,80%	389.272
d.	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	452.000	405.000	89,60%	47.000
e.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.360.000	3.354.000	99,82%	6.000
Jumlah		15.959.678	15.517.406	97,23%	442.272

3. Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur adalah Rp4.390.750 atau 88,70% dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.950.000	4.390.750	88,70%	559.250
b.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	0
Jumlah realisasi Program		4.950.000	4.390.750	88,70%	559.250

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur adalah Rp230.000,- atau 100% dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			Sisa
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	(%)	
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	230.000	230.000	100%	0
Jumlah realisasi Program		230.000	230.000	100%	0

5. Program Administrasi Bidang Perekonomian

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Administrasi Bidang Perekonomian adalah **Rp328.312.871,-** atau **99,12%** dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Kegiatan pada Program Administrasi Bidang Perekonomian Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			Sisa (Rp)
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	(%)	
a.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	102.350.000	102.285.000	99,94%	65.000
b.	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	92.195.000	89.411.095	96,98%	2.783.905
c.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	136.697.000	136.616.776	99,94%	80.224
Jumlah realisasi Program		331.242.000	328.312.871	99,12%	2.929.129

6. Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang adalah **Rp224.378.288,-** atau **89,75%** dari Pagu, dengan rincian berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Kegiatan pada Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT
di Kabupaten Malang Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa
			(Rp)	(%)	
a.	Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai	250.000.000	224.378.288	89,75%	25.621.712
Jumlah realisasi Program		250.000.000	224.378.288	89,75%	25.621712

Untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda, maka perlu dilakukan perbandingan secara horizontal, yaitu dengan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan rincian perkembangan realisasi anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2019 dan 2020 per program dan kegiatan:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan 2020

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.870.981	97,35	341.997.717	99,49
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.018.000	88,40	35.300	83,39
b.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	223.128.425	98,18	215.195.366	99,71
c.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.475.300	99,93	6.200.800	99,60
d.	Penyediaan alat tulis kantor	26.874.800	99,63	15.780.500	99,97
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.960.200	85,39	2.566.000	98,91
f.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.223.300	76,50	963.700	99,68
g.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	97,22	1.900.000	98,70
h.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.855.100	91,61	3.599.800	98,57
i.	Penyediaan makanan dan minuman	5.120.000	87,07	2.340.000	83,57
j.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	56.520.856	93,61	24.691.251	98,23
k.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	78.595.000	99,90	68.725.000	99,85
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.201.433	94,20	15.517.406	97,23
a.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.190.000	99,69	0	0
b.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	442.000	88,40	0	0
c.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	11.856.933	90,76	11.758.406	96,80

d.	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	715.000	99,31	405.000	89,60
e.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.997.500	99,58	3.354.000	99,82
3.	Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	17.825.000	98,51	4.390.750	88,70
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	7.700.000	98,79	4.390.750	88,70
b.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10.125.000	98,30	0	0
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.135.000	91,42	230.000	100
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	105.135.000	91,42	230.000	100
5.	Program Administrasi Bidang Perekonomian	768.461.743	98,60	328.312.871	99,12
a.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	240.584.737	99,42	102.285.000	99,94
b.	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	236.632.698	96,33	89.411.095	96,98
c.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	291.244.308	99,82	136.616.776	99,94
6.	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	196.850.535	98,43	224.378.288	89,75
a.	Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai	196.850.535	98,43	224.378.288	89,75
Jumlah		1.612.434.692	97,45	914.827.032	96,69

C. Prestasi

Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada tahun 2020 belum mendapatkan kesempatan meraih prestasi secara formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun pihak-pihak lain.

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun untuk memenuhi kewajiban dengan menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Berangkat dari Renstra Perubahan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2016-2021 dan dilatarbelakangi oleh komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang dimiliki, diperoleh obyektifitas informasi penetapan indikator dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian. Kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Informasi yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja ini dipengaruhi oleh sistem dan peraturan perundangan yang berlaku serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun. Karenanya, pengukuran kinerja wajib secara kontinyu dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang lebih realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga Laporan Kinerja yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat progress atas keputusan yang sifatnya strategis guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi Perekonomian Setda dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

- Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
- Menjadikan Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- Mendorong Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; serta
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda.



LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang



TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator	Indikator or sasaran	Sasaran	Indikator program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana	Perangkat Daerah yang Jember	Lokasi					
						Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021				
						Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Tar get	Rp.	Sbr. Dana	Tar get	Rp.	Sbr. Dana	Tar get	Rp.	Sbr. Dana				Tar get	Rp.	Sbr. Dana	Tar get	
1	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	8 100 %	9 233.75 6.370	10 10 %	11 100 %	12 824.06 7.000	13 100 %	14 100 %	15 248.23 1.008	16 100 %	17 100 %	18 257.39 2.614	19 100 %	20 100 %	21 267.47 0.880	22 100 %	23 100 %	24 1.339. 917.37 2	25 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang	
2	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 Jumlah pegawai administrasi keuangan (OB)	15 100 %	225 824.06 7.000	17 100 %	17 100 %	18 257.39 2.614	19 100 %	20 100 %	21 267.47 0.880	22 100 %	23 100 %	24 1.339. 917.37 2	25 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang							
3	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	3. Penyediaan Jasa Ketersahaan Kantor	7 Jumlah petugas kesehatan (OB)	17 100 %	156.28 8.000	17 100 %	17 100 %	18 257.39 2.614	19 100 %	20 100 %	21 267.47 0.880	22 100 %	23 100 %	24 1.339. 917.37 2	25 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang							
4	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	7 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 100 %	20.079 5.000	42 100 %	42 100 %	43 20.079 5.000	44 100 %	45 100 %	46 20.079 5.000	47 100 %	48 100 %	49 20.079 5.000	50 100 %	51 100 %	52 20.079 5.000	53 100 %	54 100 %	55 20.079 5.000	56 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang	
5	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	5. Penyediaan Barang Cetak dan Peragaannya	7 Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	7 100 %	4.339. 200	7 100 %	7 100 %	8 4.339. 200	9 100 %	10 100 %	11 4.339. 200	12 100 %	13 100 %	14 4.339. 200	15 100 %	16 100 %	17 4.339. 200	18 100 %	19 100 %	20 4.339. 200	21 18.431. 542	22 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang
6	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	6. Penyediaan Komponen Informatika/Peraturan Bangunan Kantor	9 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 100 %	2.503. 800	9 100 %	9 100 %	10 2.503. 800	11 100 %	12 100 %	13 2.503. 800	14 100 %	15 100 %	16 2.503. 800	17 100 %	18 100 %	19 2.503. 800	20 100 %	21 100 %	22 14.890. 198	23 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang	
7	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Efektif SIPD	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Daerah	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-Undangan	2 Jumlah Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-Undangan	2 100 %	1.520. 000	2 100 %	2 100 %	3 1.520. 000	4 100 %	5 100 %	6 1.520. 000	7 100 %	8 100 %	9 1.520. 000	10 100 %	11 100 %	12 1.520. 000	13 100 %	14 100 %	15 14.076. 118	16 Bagian Perkeron omian	Kab. Malang	

Kantor	15. Penyalahgunaan Rutin/ Berhala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipeliharakan Rutin/ Berhala (Jenis)	5	30.018.000	APB D Kabu	2	9.170.000	APB D Kabu	3	4.605.266	APB D Kabu	3	4.605.266	APB D Kabu	3	5.065.786	APB D Kabu	3	5.572.965	APB D Kabu	3	54.431.411	Bagian Persekon	Kab. Mula
	16. Penyalahgunaan Rutin/ Berhala Gedung Kantor	Jumlah Perakatan Gedung Kantor yang dipeliharakan Rutin/ Berhala (Jenis)	3	4.155.000	APB D Kabu	12	6.690.000	APB D Kabu	3	6.007.890	APB D Kabu	3	6.007.890	APB D Kabu	3	7.808.679	APB D Kabu	3	8.358.547	APB D Kabu	3	33.750.116	Bagian Persekon	Kab. Mula
	III. Program Peningkatan Diapala Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100	10.130.000	APB D Kabu	100	18.600.000	APB D Kabu	100	14.400.000	APB D Kabu	100	14.400.000	APB D Kabu	100	14.400.000	APB D Kabu	100	14.400.000	APB D Kabu	100	66.930.000	Bagian Persekon	
	17. Peningkatan Paksi Dinas Perseksi Perseksi	Jumlah penyediaan Paksi Dinas (Stel)	13	7.405.000	APB D Kabu	17	3.400.000	APB D Kabu	16	9.000.000	APB D Kabu	16	9.000.000	APB D Kabu	16	9.000.000	APB D Kabu	16	9.000.000	APB D Kabu	48	39.685.000	Bagian Persekon	Kab. Mula
	18. Peningkatan Paksi Huri Terentu	Jumlah penyediaan Paksi Huri Terentu (Stel)	13	2.665.900	APB D Kabu	17	10.200.000	APB D Kabu	16	4.800.000	APB D Kabu	16	4.800.000	APB D Kabu	16	4.800.000	APB D Kabu	16	4.800.000	APB D Kabu	48	27.265.000	Bagian Persekon	Kab. Mula
	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100	27.780.000	APB D Kabu	100	102.685.000	APB D Kabu	100	19.000.000	APB D Kabu	100	19.000.000	APB D Kabu	100	19.000.000	APB D Kabu	100	19.000.000	APB D Kabu	100	178.465.000	Bagian Persekon	
	19. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	13	27.780.000	APB D Kabu	17	102.685.000	APB D Kabu	16	15.000.000	APB D Kabu	16	15.000.000	APB D Kabu	16	15.000.000	APB D Kabu	16	15.000.000	APB D Kabu	48	178.465.000	Bagian Persekon	Kab. Mula
	V. Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pelayanan Masyarakat dan Keuangan	Persentase Dokumen Laporan, Laporan, Laporan Akhir Tahun	100	3.552.000	APB D Kabu	0	0	APB D Kabu	0	7.425.230	APB D Kabu	0	7.425.230	APB D Kabu	0	9.267.793	APB D Kabu	0	10.194.528	APB D Kabu	0	30.449.511	Bagian Persekon	
	20. Peningkatan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Bulan)	2	3.552.000	APB D Kabu	0	0	APB D Kabu	2	3.316.852	APB D Kabu	2	3.316.852	APB D Kabu	2	3.648.537	APB D Kabu	2	4.013.391	APB D Kabu	2	14.540.780	Bagian Persekon	Kab. Mula
	21. Peningkatan Laporan Keuangan Semester I dan	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan	0	0	APB D Kabu	0	0	APB D Kabu	1	4.108.378	APB D Kabu	1	4.108.378	APB D Kabu	1	5.619.216	APB D Kabu	1	6.181.137	APB D Kabu	1	15.908.731	Bagian Persekon	Kab. Mula

		Jumlah dan potensi ekonomi	1 data potensi	34.208 .000	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	35.312 .000	Bagian Perolehan	Kab. Malang
27. Kecelakaan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan Modal		Jumlah dan potensi ekonominya sebanyak capaian kegiatan promosi investasi dan produk unggulan	1 Laporan	117.622 7.000	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	128.043.000	Bagian Perolehan	Kab. Malang
28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	IX. Program Perindungan Konsumen	Persepsi Cakupan Pengawasan Distribsi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang	100 %	316.366 3.366	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	316.3663.366	Bagian Perolehan	Kab. Malang
29. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	X. Program Pengawasan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perikanan)	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan setiap minggu	2 Laporan	316.366 3.366	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	316.3663.366	Bagian Perolehan	Kab. Malang
30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidy Pertanian	XI. Program Penguat dan penguatan	Jumlah Pelaporan Hasil Pengawasan Distribusi Ekspor/Impor yang Disajikan kepada Pimpinan	0 %	0 0	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 0	Bagian Perolehan	Kab. Malang
31. Peningkatan manajemen Invektasi	XII. Program Penguat dan penguatan	Persepsi terlaksanaan nya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	197.034.000	APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	0 data potensi	0 APB D Kabupaten	197.034.000	Bagian Perolehan	Kab. Malang

Daerah	Daerah	menajemen investasi daerah																	Bagian Perolehan	Kab. Malang
	XII. Program Pelaksanaan program perbelanjaan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32. Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kelangkaan Sadah Cibi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XIII. Program Pembinaan Industri Rokok dan tembakau	100 %	196.90 0.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.90 0.800	0	0
	33. Penyempurnaan Informasi Ketertarikan Peraturan Prundang, Prundang di Bidang Cukai	2 Laporan	196.90 0.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.90 0.800	0	0
	Masyarakat dan/atau Peningkatan Kepentingan, Serta pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Prundang, Undangan di Bidang Cukai	2 Laporan	196.90 0.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.90 0.800	0	0
	XIV. Program peningkatan pelayanan Publik	100 %	203.29 2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.29 2.000	0	0
	34. Peningkatan Pengendalian Televisi	2 Laporan	203.29 2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.29 2.000	0	0
	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raski	2 Laporan	203.29 2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.29 2.000	0	0

Kv. Monitori ng dan erolusi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT	0%	0	150.00 0.000	100 %	150.00 0.000	100 %	150.00 0.000	100 %	150.00 0.000	100 %	600.00 0.000	Bagian Perak nomina
35. Kegiatan Pencastelan dan Perhimpn situs Pelaksanaan Keterruan Peraturan Perundang- undangan di Belang Cakof	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	0 Lap ora n	0	150.00 0.000	2 Lap ora n	150.00 0.000	2 Lap ora n	150.00 0.000	2 Lap ora n	150.00 0.000	2 Lap ora n	600.00 0.000	Bagian Perak nomina
TUJUAN : 1. SARAPAN : 1 INDIKATOR	SARAPAN : 1 PROGRAM : 15 KEGIAT		1.726, 867.20 5	1.473, 234.00 0		2.091, 325.45 5		2.375, 446.17 3		2.381, 143.77 7		6.697, 915.38 5	Bagia n Perak onom ina
TOTAL													

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	
1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	A	A
2	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Telp/Fax.(0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id - Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T**
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Malang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

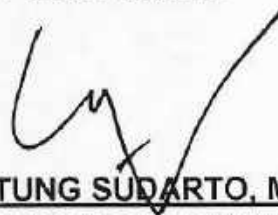
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun Jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, November 2020

Pihak Kedua

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661217 199303 1 006

Pihak Pertama

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661218 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian.	100 %

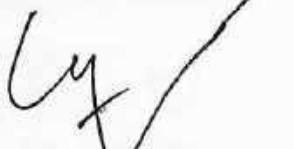
Program	Anggaran	Ket
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 343.766.763,11,-	APBDP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 15.959.678,00,-	APBDP
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 4.950.000,00,-	APBDP
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 230.000,-	APBDP
5. Program Administrasi Bidang Perekonomian	Rp. 331.242.000,00,-	APBDP
6. Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	Rp. 250.000.000,00,-	DBHCHT
JUMLAH	Rp. 946.148.441,11,-	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, November 2020

SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661217 199303 1 006

**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19661218 199303 1 006

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA. KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas kelola pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Presentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang direkomendasikan	100%	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan 2 Laporan	Rp241.059.700,00 Rp273.433.000,00
					Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	Rp242.435.000,00

Malang, Januari 2020
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.I
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA		
		Sub Bagian	Target	Realisasi (%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Presentase Bahan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	100%
		Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	100%
		Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	100%

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA.
 KABUPATEN MALANG

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661218 199303 1 006